

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis kata pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Berangkat dari pengertian tersebut, untuk itu pemberdayaan dapat diartikan sebuah proses menuju berdaya, atau proses untuk mendapatkan daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya terhadap pihak yang kurang maupun belum berdaya.¹⁹ Bagian paling utama pada suatu pemberdayaan ialah meningkatnya kesadaran masyarakat. Manusia yang sadar adalah apabila mereka mengerti perihal dan tanggung jawab mereka sebagai seorang manusia merdeka yang bermasyarakat dan beragama yang mengemban misi sebagai insan individu, insan sosial dan menjadi pemimpin di muka bumi. Sehingga mereka akan mampu melindungi dirinya dan melawan ketimpangan yang terjadi padanya.²⁰

Pemberdayaan masyarakat ialah sebuah proses untuk memberikan sarana dan mendorong masyarakat supaya mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi tokoh utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya demi tercapainya suatu keberlanjutan dalam jangka lama. Sehingga pemberdayaan haruslah dilihat secara komprehensif dengan hasil akhir masyarakat menjadi berdaya, mempunyai otoritas, menjadi subyek dalam pembangunan, dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.²¹

¹⁹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 77.

²⁰Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 24-25.

²¹Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),70.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) bagi seluruh masyarakat.²² Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merujuk pada kemampuan individu masyarakat, khususnya pada golongan lemah atau rentan agar mereka mempunyai kemampuan yang baik, antara lain:

- a. Kebutuhan dasar terpenuhi, agar mereka mempunyai kebebasan artinya bukan hanya dalam hal penyampaian gagasan, akan tetapi juga bebas dari kebodohan, kelaparan, dan dari kesakitan.
- b. Menggali sumber-sumber yang bermanfaat yang menunjang mereka dalam meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.
- c. Mengikuti proses pembangunan dan keputusan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan mereka.²³

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebito adalah bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.

a. Bina manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Yang termasuk dalam upayabina manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/ pengembangan kapasitas yaitu: pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan kapasitas sistem.

b. Bina usaha

Bina usaha adalah suatu upaya yang penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak

²² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 23.

²³ Rozzana Erziaty, "Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2. (2015), 87-88.

atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau non ekonomi) tidak akan laku.

c. Bina lingkungan

Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk kesejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik alam maupun sosial. Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan.

d. Bina kelembagaan

Efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Bina kelembagaan tidak cukup dengan pembetulan lembaga yang dibutuhkan, namun jauh lebih penting dari pembentukannya adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah terbentuk tersebut mampu berfungsi secara efektif.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis masyarakat (*people centered development*). Mengenai hal ini, pengertian apapun yang diberikan terhadapnya selalu tertuju pada usaha perbaikan, paling utama pada perbaikan kualitas hidup manusia, baik dari segi materi, moral, ekonomi maupun sosial budayanya. Merujuk pada konsep tersebut untuk itu tujuan pemberdayaan melingkupi upaya perbaikan di bawah ini:

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*),
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accesbility*),
- c. Perbaikan tindakan (*better action*),
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*),
- e. Perbaikan usaha (*better business*),
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*),

- g. Perbaiki lingkungan (*better environment*),
- h. Perbaiki kehidupan (*better living*),
- i. Perbaiki masyarakat (*better community*).²⁴

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip merupakan pernyataan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan yang konsisten. Oleh karena itu, prinsip tersebut akan diterima secara universal, dan dianggap benar dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip ini dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan yang benar.²⁵

Menurut Sutrisno terdapat 5 prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan²⁶, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): di kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk selanjutnya mengembangkan gagasan serta berbagai kegiatan secara bertahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat mempunyai kekuasaan di setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: adalah pengembangan kemitraan beserta seluruh lapisan masyarakat sehingga dalam program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan: ialah kebijakan dan strategi di tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: ialah bagian dari program pengelolaan.

²⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 111-112.

²⁵ Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 24.

²⁶ Engkus Kusmana, Regi Refian Garis, "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (Ppl) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis", *Jurnal Moderat*, 2019, 463-464.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak bersifat permanen, melainkan sampai masyarakat binaan mampu untuk mandiri, kemudian dilepaskan agar mampu mandiri, meski dilihat dari kejauhan tetap dilindungi agar tidak jatuh lagi. Dari sudut pandangan ini berarti pemberdayaan melalui proses pembelajaran untuk memperoleh status mandiri. Namun, untuk menjaga kemandirian tersebut semangat, kondisi, dan kemampuan terus dijaga agar tidak mengalami kemunduran.

Pemberdayaan bersifat berkesinambungan sebagai suatu proses, dan masyarakat atau kelompok tetap ingin melakukan perbaikan dan perubahan, tidak hanya terfokus pada suatu program saja. Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk menjadi berdaya serta mandiri, dan bukan sebuah proses yang instan. Sebagai proses, ada tiga tahap pemberdayaan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Senada dengan itu, Sulistyani membagi proses pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku
- b. Tahap transformasi kapasitas wawasan dan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan kecakapan intelektual agar terbentuk kemampuan berinovasi dan kemandirian.²⁷

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto juga membagi proses pemberdayaan menjadi 3, yaitu:

- a. Fase penyadaran, yang menjadi target yakni masyarakat dengan ekonomi kurang mampu yang layak diberikan “pencerahan” dengan menyampaikan penyadaran bahwa mereka sebenarnya mempunyai hak untuk bisa dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Mereka layak diberikan dorongan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari angka kemiskinan.

²⁷ Sulistyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 83

- b. Fase pengkapasitasan, fase ini terdiri dari tiga bentuk pengkapasitasan yakni sistem nilai, pengkapasitasan manusia, dan koperasi. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan melaksanakan “aturan main” pada koperasi yang berbentuk peraturan dan harus dijalankan oleh semua anggotanya. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapasitasan koperasi dilakukan dengan cara membuat rekonstruksi koperasi agar dapat menghadirkan inovasi baru dalam perubahan yang diberikan kekuatan atau daya, otoritas dan peluang, kekuasaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar target sasaran bisa menjalankan otoritas yang dicanangkan serta dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi.
- c. Fase pendayaan, fase ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik.

Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi terdapat tujuh tahap-tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut²⁸:

- a. Tahap persiapan, yakni persiapan petugas serta lapangan. Pemahaman tim fasilitator disetarakan dalam memilih pendekatan yang akan digunakan. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan agar kelayakan terhadap daerah yang nantinya akan diberdayakan.
- b. Tahap identifikasi masalah (*Assesment*), tahap ini dilakukan agar dapat mengenali masalah dan sumber daya yang ada dalam masyarakat sasaran pemberdayaan.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini fasilitator secara aktif ikut serta dalam mencoba melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana pemecahan masalahnya. Upaya mengatasi permasalahan yang ada

²⁸ Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat.*, 35-37.

pada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa pilihan program dan kegiatan yang bisa dilakukan.

- d. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini fasilitator membantu individu masyarakat target pemberdayaan untuk merumuskan tujuan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan diberikan pada pihak penyedia dana atau investor.
 - e. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat melaksanakan tujuan yang telah dirumuskan bersama. Dalam upaya melaksanakan program pemberdayaan memerlukan peran dari penyedia atau fasilitator dan masyarakat. Pentingnya kerjasama yang baik antara masyarakat dan fasilitator untuk menjaga kemungkinan sesuatu yang tidak diinginkan selama proses pemberdayaan berlangsung.
 - a. Tahap evaluasi, pemantauan terhadap program dilakukan oleh penyedia atau fasilitator dan masyarakat. Keikutsertaan fasilitator dan masyarakat pada tahap ini sangat penting untuk evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Tahap terminasi, pada tahap ini dilakukan pemutusan hubungan secara formal antara fasilitator dan masyarakat. Pemutusan hubungan baiknya dilakukan saat masyarakat telah mandiri dan dapat mengembangkan kemampuannya.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Konsep pemberdayaan masyarakat telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dengan memberikan contoh mengenai prinsip keadilan, persamaan, tolong-menolong dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, sikap toleransi yang hakiki sejak masa pemerintahannya. Sehingga Rasulullah SAW mempunyai prinsip untuk saling menghargai etos kerja, saling tolong-menolong dengan warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan dan kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara satu dengan yang lain. Di antara

prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat yaitu :

a. Prinsip keadilan

Kata keadilan yang terdapat dalam Al-Quran merupakan urutan ketiga terbanyak dalam Al-Quran setelah kata Allah dan *'Ilm*. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai dasar keadilan ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.

Masyarakat muslim yang sesungguhnya ialah mereka yang memberikan keadilan mutlak kepada seluruh masyarakat, menjaga martabat dalam distribusi kekayaan yang adil, memberikan kesempatan bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya tanpa bertolak dengan kekuasaan orang-orang yang dapat mencuri hasil usaha mereka.²⁹ Keadilan sosial dalam masyarakat Islam berlaku bagi semua masyarakat yang berbeda agama, ras, warna kulit dan bahasa. Ketika seluruh umat islam di dunia ini dapat menerapkan keadilan, maka masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk tidak berdaya dan tertindas oleh orang-orang yang lebih beruntung.

b. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang didasarkan pada keyakinan yang sama dengan hasil dari prinsip keadilan. Islam melihat setiap orang secara individu, bukan sebagai komunitas di sebuah negara, manusia dengan segala perbedaan adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dari sisi kedudukannya sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya. Semua kebutuhan dasar manusia telah diatur secara menyeluruh,

²⁹ Muhammad Ali Al-Hasyimi, "Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim", *Jurnal Islamhouse.Com*, 2009, 7.

kemungkinan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier sesuai tingkat kemampuannya.³⁰

Dalam prinsip persamaan tidak ada perbedaan dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanya dari segi kemampuan, bakat minat, amal, usaha dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan bidang pekerjaan.. Islam juga tidak mengukur tingkatan sosial sebagai perbedaan. Oleh sebab itu yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketakwaan seorang individu kepada Allah. Maka semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.

c. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Tolong-menolong (*ta'awun*) berasal dari bahasa arab yang berarti berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt. Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang mudah bagi permasalahan ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri menjadi sifat yang sebaliknya.³¹

d. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi ialah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan proses interaktif berkelanjutan. Di dalam prinsip partisipasi masyarakat terlibat secara langsung dan aktif untuk membangun diri, kehidupan dan lingkungan. Partisipasi merupakan kontribusi sukarela yang memunculkan rasa harga diri, meningkatkan harkat dan martabat dalam membentuk sebuah lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan masyarakat.

Dalam Islam pemberdayaan masyarakat harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan

³⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 52.

³¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta: Cv. Taberi, 1995), 74 - 75.

masalah-masalah yang sedang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara mandiri dan bebas. Partisipasi ditanamkan dengan baik pada masyarakat muslim pada zaman Rasulullah dan akan berdampak sangat baik dalam keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.³² Disisi lain kesejahteraan masyarakat itu merupakan jumlah dari berbagai pilihan yang ada dan juga kebebasan guna menentukan pilihan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kesejahteraan masyarakat ini dapat digambarkan dengan suatu keadaan yang tidak menempatkan suatu aspek yang lebih penting dari aspek lainnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi saja tetapi juga pada faktor sosial dan juga politik. Konsep kesejahteraan terbagi menjadi dua diantaranya:³³

- a. Kesejahteraan individu artinya cara untuk menghubungkan kesejahteraan dengan pilihan individu yang ada secara obyektif.
- b. Kesejahteraan sosial artinya cara untuk menghubungkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang di dapat dengan cara seseorang harus menjumlahkan kepuasan individunya dalam masyarakat

2. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Isla, mempunyai mempunyai tujuan utama yaitu merealisasikan tujuan manusia demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), juga kehidupan yang baik dan terhormat (*al hayah al-thayyibah*). Hal ini menjadi definisi

³² Rudy Badrudin, *Ekonometika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012), 145.

³³ *Ibid.*, 146.

kesejahteraan pada pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.³⁴

Ayat Al-Quran yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 9:



Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*³⁵

Berdasarkan dari ayat tersebut, disimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap keturunan yang lemah merupakan representasi dari kemiskinan, yang menjadi musuh dari kesejahteraan. Ayat tersebut memberi anjuran manusia untuk menjauhi kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional).³⁶

Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan keturunannya supaya tidak masuk dalam kondisi kemiskinan, hal itu dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi melalui pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan materi dan immateri, sehingga ke depannya mampu terbentuk SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak merupakan harta termahal bagi orang tua.

³⁴ Umaer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

³⁵ Alquran, an-Nisa (4):9.

³⁶ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015), 39.

Kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertakwa kepada Allah SWT), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT juga menganjurkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang kuat, baik dalam hal ketakwaannya kepada Allah SWT.³⁷

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Keluarga sejahtera diartikan sebagai keluarga yang terbentuk berdasarkan atas pernikahan sah baik agama maupun negara, kebutuhan hidup psikis dan materi terpenuhi secara layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional membagi kriteria yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan keluarga menjadi lima tahapan yaitu³⁸ :

- a. Keluarga pra sejahtera. Apabila belum dapat memenuhi satu atau lebih dari enam indikator keluarga sejahtera I.
- b. Keluarga sejahtera tahap I. Apabila kebutuhan yang sangat mendasar terpenuhi, namun kebutuhan yang lebih tinggi belum terpenuhi. Berikut indikatornya:
 - 1) Makan dua kali sehari atau lebih
 - 2) Memiliki pakaian berbeda
 - 3) Rumah yang ditempati memiliki atap , dinding dan lantai yang baik
 - 4) Bila anggota sakit dibawa ke sarana kesehatan
 - 5) PUS ingin ber-KB kesarana pelayanan kontrasepsi
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
- c. Keluarga Sejahtera Tahap II. Apabila terpenuhi kriteria dari Keluarga Tahap I dan syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yang terdiri dari :
 - 7) Beribadah sesuai agama masing-masing
 - 8) Makan daging/ ikan/ telur seminggu sekali

³⁷ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam...*, 391.

³⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 88.

- 9) Memperoleh minimal satu baju dalam setahun
 - 10) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah
 - 11) Keluarga sehat dalam 3 bulan terakhir
 - 12) Ada anggota keluarga yang kerja
 - 13) Seluruh anggota keluarga berumur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
 - 14) PUS dengan 2 anak atau lebih menggunakan kontrasepsi
- d. Keluarga Sejahtera tahap III. Apabila syarat 1 sampai 14 terpenuhi dan bisa juga memenuhi syarat ke 15 sampai 19 yaitu:
- 15) Keluarga berupaya meningkatkan pengeluaran agama
 - 16) Sebagian penghasilan keluarga ditabung
 - 17) Makan bersama paling kurang seminggu sekali untuk menjaga komunikasi
 - 18) Mengikuti kegiatan masyarakat
 - 19) Memperoleh informasi dari surat kabar, TV, majalah dan radio.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus. Apabila keluarga mampu memenuhi kriteria 1 sampai 19 dan setelah itu mampu memenuhi kriteria 20 serta 21 yaitu:
- 20) Memberikan sumbangan materiil
 - 21) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, akan tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*mashlahah*) masyarakat bergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu

a. Terjaganya agama (*ad-din*)

Bahwa dianjurkan bagi setiap umat Islam untuk menjaga agamanya. Memelihara agama diukur dari tercapainya kesejahteraan ialah melaksanakan pokok atau rukun islam (mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji) dan mempercayai rukun iman yakni beriman kepada Allah SWT , beriman kepada Rasul-

Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya, beriman kepada hari akhir dan percaya pada ketetapan Allah (qadha dan qadar).

b. Terjaganya hidup atau jiwa (*an-nafs*)

Kebutuhan dalam terjaganya jiwa meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal atau dengan kata lain merupakan kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut mutlak harus terpenuhi demi terjaganya jiwa manusia sehingga dapat menjaga eksistensinya dalam menjalani fungsi utama manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam Islam, hak pertama dan paling utama yang harus diperhatikan adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sehingga dalam Islam, nyawa manusia adalah suatu hal yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi keberadaannya. Sedangkan bentuk pemeliharaan atau terjaganya jiwa menurut Ryandono adalah diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Untuk itu kebutuhan akan pangan lebih didahulukan sebab jika diabaikan akan mengancam keberlangsungan hidup manusia.

c. Terjaganya intelek atau akal (*al-aql*)

Menjaga dan melindungi akal artinya menjaga dan melindungi bagaimana agar akal selalu dalam keadaan sadar dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiah. Manusia hanya diberi akal untuk mempertahankan hidupnya, hal inilah yang menjadi alasan kenapa syari'ah harus menjaga akal, terlebih akan merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Untuk menjaga akal manusia diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga mampu mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menambah bekal dan menghindari godaan dunia.

d. Terjaganya keluarga atau keturunan (*an-nasl*)

ibadah.⁴⁰ Dalam ajaran Islam prinsip tauhid merupakan hal yang paling asasi dan esensial, ia harus dipegang teguh dalam keimanan setiap muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, kecuali Allah semata dan nabi Muhammad adalah rasul-Nya.⁴¹

Indikator kedua menjelaskan pada kita bahwa seluruh rizki yang diberikan kepada manusia berasal dari Allah SWT sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Ketiga, menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera artinya hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram. Jika tidak, berbagai tindak kejahatan seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan tindakan lainnya masih terjadi di suatu komunitas masyarakat. Untuk itu komunitas yang belum terlepas dari hal tersebut belum dapat dikatakan sejahtera.

C. PTSA (Pola Tatanan Sehat dan Amanah)

Pola; sebagai “model” sistem cara kerja yang akan digunakan adalah pada system memanusiaikan manusia sepenuhnya. Pola sebagai sistem yang dibuat mengikuti alur terhadap sistem unsur-unsur kejadian manusia, yaitu yang lahir: akal pikiran, indera, dan organ tubuh, dan yang batini: hati, ruh dan rasa sebagian inti kemanusiaannya untuk diselamatkan dengan pola system yang menyelamatkan.

Tatanan; interaksi pada sistem sebagai individu yang hidup ditengah-tengah keluarga dan masyarakat serta lingkungan yang dinamikanya beraneka ragam. Manusia secara komunal (tanah, tumbuhan, manusia), membangun system keharmonisan dan sustainable (berkelanjutan).

Sehat; dalam pengertian selamat, proporsionalitas, efektif dan efisien, serasi, selaras, dan seimbang, manusia yang sehat, pikiran yang sehat, tanaman sehat, hewan yang sehat, bergerak terwujud dalam “laku” selamat dan terselamatkan. Sehat dan selamat memperhatikan dari indikator; elemen dan unsur pembentuk

⁴⁰ M. Ulinuha Jhusna, *Islam dan Kesejahteraan: Memotret Indonesia, Dialog 66* (Jakarta: Desember 2008), 43-44.

⁴¹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2005), 42.

secara fisik: kualitas benih, tingkat pertumbuhan, warna, kesegaran, jenis tanaman, faktor-faktor: cuaca, iklim, air, angin, pencahayaan: kemudian juga pada elemen sumber daya: manusia, alam, dan pendukungnya.

Amanah; bahwa adalah kemestian mengelola garapan ber dunia sebagai apapun, sebagai siapapun, dimanapun hidup, dan dimanapun tinggal membuat lakon “ibadah” sebagai “ambah-ambahan” bagian dari elemen tatanan syariat dan muamalah namun tidak dijadikan tujuan, sebab lakon sebagai “ambah-ambahan” ini adalah laku pembuktian atsar sujud sebagai pencatatan yang kokoh kembali kepada-Nya.

PTSA, pada sistem agrikultur merupakan pengelolaan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan, keselarasan, keserasian, dan kesehatan pada system pertanian dan lingkungannya yang berkelanjutan antara pertanian, peternakan, perikanan, dan atau pengelolaan pra-tanam sampai setelah panen. Dan hasil produksi dengan tetap memperhatikan pada kultur, budaya dan kebiasaan menuju budaya “belajar”, untuk memakmurkan bumi milik Allah.

Manusia diciptakan dari bumi, lahir di bumi, hidup di bumi, menginjak bumi, makan dan minum di bumi dan dari hasil bumi. Maka memakmurkan bumi Allah itu supaya kamu selalu dalam ampunan Allah, dan selalu jadikan segala aktifitas memakmurkan bumi untuk kembali dengan selamat kepada-Nya. Sungguh Allah akan memperkenankan (mewujudkan). (*Q.S Huud 61*), *Seratan Kyai Tanjung*.⁴²

⁴² <http://gusjemb.blogspot.com/2016/02/sop-pts-pomosda.html>